

## **PELAKSANAAN DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG**

**Farid Septian<sup>1</sup>**

*farid\_batawy@yahoo.com*

### **Abstract**

*Penitentiary, on one side is a vulnerable place for inmates' deradicalization. On the other side, it plays an important role as positive transformation incubator for the inmates. It truly depends on inmates' coaching model, especially terrorism inmates' coaching. Radicalization here, is a flourishing and spreading process of radical values brought by terrorism inmates to the others. This research has done in Cipinang class I penitentiary, using qualitative methods. The goal of this research is to know the terrorism inmates' coaching pattern in order to deradicalize them and what kind of problems that occurs during the process. In implementation of terrorism inmates' deradicalization, Cipinang class I penitentiary is cooperates with MUI, Depag and NGO. There are obstacles, which are inadequate facilities and infrastructure, "hard" character of the terrorism inmates, coaching staff's condition which still needs for quality and quantity upgrades, and lack of goverment and society's support.*

*Keywords: radicalization, deradicalization, penitentiary, terrorism.*

Indonesia merupakan negara yang memiliki permasalahan terorisme yang cukup mengkhawatirkan. Rentetan peristiwa serangan terorisme mulai dari serangkaian Bom Malam Natal, Bom Kedubes Filipina, Bom Bali I dan II, dan terakhir Bom JW Marriot dan Ritz Calton yang terjadi pada 17 Juli 2009 merupakan indikasi bahwa terorisme di Indonesia menjadi fenomena. Meminjam kategori Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang kondisi perkembangan terorisme, maka Indonesia masuk dalam kategori negara kritis (*critical*), dimana kelompok teroris telah masuk ke dalam negara dan mereka memiliki kemampuan untuk melakukan operasi penyerangan dan mampu memilih target serangan secara selektif, lebih jauh dari itu sejarah dan tujuan gerakan kelompok teroris tersebut diketahui (Whittaker, 2003:274). Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku terorisme tidak gentar dengan hukuman pidana yang diancamkan kepada mereka.

---

<sup>1</sup> Alumni program Sarjana Reguler Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ideologi atau pemahaman radikal pelaku terorisme mengalahkan rasa takut mereka terhadap hukum pidana yang diancamkan kepada para teroris.

Merebaknya fenomena terorisme di Indonesia jelas sangat merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Tindakan terorisme yang telah terjadi memaksa pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan (*policies*) dalam rangka melakukan pengamanan yang lebih ekstra, agar kemudian tindakan terorisme yang merugikan tersebut tidak terulang di kemudian hari. Oleh karena itu, supremasi hukum sudah seharusnya ditegakkan di Indonesia, terutama dalam hal menyangkut tindak terorisme yang sangat berdampak destruktif bagi kelangsungan hidup manusia. Pelaku tindak pidana terorisme harus mengikuti proses peradilan pidana secara utuh, mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di tingkat Kepolisian, penuntutan di tingkat Kejaksaan, pemeriksaan di Pengadilan dan akhirnya institusi penghukuman yang lazim disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan (*correctional institutions*).

Dalam hal penangkapan dan penanggulangan kejahatan terorisme, aparat penegak hukum layak mendapatkan apresiasi karena telah banyak menangkap dan menjatuhkan hukuman pidana kepada teroris yang terbukti bersalah di hadapan pengadilan yang kemudian dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Zarkasih<sup>2</sup> (Densus 88 AT), yaitu bahwa menurut catatan Kepolisian jumlah seluruh teroris yang sudah ditangkap dalam periode pada tahun 2000-2009 bulan Juli sebanyak 596 orang, 553 ditangkap dan 63 sisanya tewas pada saat penangkapan. Data yang disampaikan oleh Densus 88 AT sedikit berbeda dengan data yang dipaparkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yaitu bahwa jumlah narapidana terorisme pada tahun 2010 berjumlah 118 orang, sebanyak 210 orang telah dibebaskan dan sekitar 53 orang napi mendapatkan remisi. Perbedaan data tersebut dikarenakan data Ditjenpas berdasarkan putusan pengadilan yang tetap yakni vonis hakim, sedangkan kepolisian adalah jumlah seluruh orang yang terlibat dan menjadi tersangka terorisme. Sebagai contoh, Densus menangkap dengan dugaan terorisme, namun ketika dalam proses pengadilan hanya terbukti dan dihukum karena kasus kepemilikan senjata api.

Namun, penangkapan pelaku narapidana terorisme saja tidaklah cukup untuk membuat paham radikal yang melekat pada teroris tersebut hilang. Malah terdapat indikasi atau kemungkinan narapidana teroris tersebut

---

<sup>2</sup> Disampaikan pada saat *Focus Group Discussion* di Kementerian Hukum dan HAM dengan tema "Pembinaan Khusus Narapidana Teroris dalam rangka Penanggulangan Terorisme di Indonesia", yang diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2010.

menyebarkan paham radikal ke dalam lembaga pemasyarakatan dan dapat mempengaruhi narapidana lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Greg Hannah, *et al* (2008) merujuk pada strategi kontra terorisme pemerintahan Kerajaan Inggris bahwa tempat-tempat tertentu dapat menjadi sumber-sumber pengaruh radikalisisasi. Masjid menjadi tempat yang masih tetap memiliki pengaruh, tapi fakta-fakta lain juga menunjukkan bahwa individu dapat menjadi radikal ketika sedang menjalani hukuman di dalam penjara.

Sebagaimana dilaporkan oleh International Crisis Group (ICG) tahun 2007 yang berjudul *Deradicalisation and Indonesian Prisons* bahwa terjadi sebuah kasus menarik di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali dimana pelaku utama Bom Bali yaitu Amrozi, Imam Samudra dan Mukhlash mampu mempengaruhi narapidana lain dan para sipir. Salah satu narapidana yang berhasil dipengaruhi adalah Ahmed (bukan nama sebenarnya), seorang narapidana beragama Hindu dan dihukum lantaran kasus penggermoan dan narkoba pada tahun 2001. Interaksi awal *trio bomber* dengan narapidana lain biasanya terjadi pada saat mereka menjadi *tamping* masjid, termasuk Ahmed yang mengaku simpatik dengan sikap dari Amrozy.

Selain itu, Noor Huda Ismail (Direktur Yayasan Perdamaian) dalam salah satu tulisannya yang berjudul *Prison Radicalization and How It Happens: an Analysis into Root Causes of Terrorism* mengatakan bahwa radikalisisasi merupakan dampak dari pemenjaraan itu sendiri, baik bagi narapidana kasus terorisme maupun narapidana kasus lainnya.

Huda menambahkan bahwa Aman Abdurrahman -seorang teroris garis keras (*hard-liner*)- telah berhasil merekrut setidaknya 3 orang napi yang sebelumnya tidak memiliki kecenderungan untuk berjihad di penjara Sukamiskin, Bandung. Ketiga orang tersebut adalah pertama Yuli Harsono, seorang militer yang dibebaskan kemudian terlibat dalam aktivitas teroris dan membunuh 2 orang polisi di Jawa Tengah. Dia pada akhirnya tewas tertembak oleh polisi pada saat penyerangan tersangka teroris Abdullah Sunata. Yang kedua Hamzah, ditangkap pada awal Agustus 2010 di Cibiru Bandung. Hamzah diduga keras terlibat dalam rencana penyerangan konvoi Presiden. Kemudian yang ketiga adalah Gema Awal Ramadhan seorang lulusan STPDN yang terlibat dalam *training camp* di Aceh pada Februari 2010. Pengalaman ini mengindikasikan bahwa siapapun dapat menjadi target radikalisisasi (*The Jakarta Post* 7/8/2010).

Fenomena penyebaran pemahaman radikal di dalam penjara (Lapas) tidak terlepas dari kondisi Lapas itu sendiri. Peter R. Neumann dalam sebuah laporan penelitian yang berjudul *Prisons and Terrorism*

*Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries*<sup>3</sup> mengatakan bahwa salah satu permasalahan penjara yang menjadi sorotan adalah bahwa penjara memiliki peran yang besar dalam narasi gerakan radikal militan di era modern. Penjara merupakan tempat yang rentan (*vulnerable*) bagi terjadinya radikalisasi. Radikalisasi yang dimaksud adalah proses dimana narapidana “biasa” terekrut dan terlibat dalam kelompok ekstrim di dalam penjara atau proses dimana narapidana yang memang sudah terlibat dalam kelompok ekstrim menjadi lebih radikal dan menyebarkan pemahaman radikalnya ke narapidana lain.

Radikalisasi dapat terjadi di dalam penjara karena narapidana - meminjam istilah Frank J. Cilluffo (2007:114)- adalah *captive audience* yang sering mengalami banyak karakteristik yang mempermudah mereka rentan untuk mengalami radikalisasi, seperti alienasi, sikap anti sosial, kekecewaan, isolasi sosial, dan kecenderungan mendapatkan kekerasan. Lebih jauh, narapidana biasanya bergabung dalam sebuah *gang* di penjara untuk mendapat perlindungan (*protection*), dari sinilah kemungkinan ekstrimisme memiliki kesempatan untuk mempengaruhi narapidana lain. Dalam hal ini, Kelompok *jihdist* mengadaptasi upaya kelompok ekstrim lain dalam rangka menyebar ideologi mereka diantara narapidana.

Namun, pada saat yang sama sebenarnya penjara juga memiliki banyak kesempatan untuk menjadi inkubator transformasi positif bagi narapidana di dalamnya. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan sistem dan pendekatan yang digunakan oleh penjara dalam melakukan pembinaan terhadap narapidananya. Bagaimanapun, Lapas dengan segala kondisinya berpotensi menjadi wadah penyemaian paham radikal yang dibawa oleh narapidana terorisme. Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan Lapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme.

Apa yang terjadi di Lapas Kerobokan Bali, Lapas Sukamiskin Bandung, termasuk kembali ditangkapnya Air Setiawan, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa narapidana terorisme di dalam Lapas dapat melakukan

---

<sup>3</sup> International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) In partnership with the National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), based at the University of Maryland. The author of this report is Peter R. Neumann. Its empirical basis are 15 country reports that were written by the following experts: Omar Ashour (Algeria and Egypt); Laila Bokhari (Pakistan); Chris Boucek (Saudi-Arabia and Yemen); Andrew Coyle (United Kingdom); Boaz Ganor and Ophir Falk (Israel); Rohan Gunaratna (Singapore); Bob de Graaff and Eelco Kessels (Netherlands); Arie Kruglanski and Michelle Gelfand (Philippines); Jean-Luc Marret (France); Sidney Jones (Indonesia); Marisa Porges (Afghanistan); Manuel Torres (Spain); and Bert Useem (United States). Sponsored by: The Department of Foreign Affairs and Trade, Australia. The National Coordinator for Counterterrorism, The Netherlands. The Office for Security and Counterterrorism, Home Office, United Kingdom

perekrutan dan kembali melakukan tindak kejahatan terorisme setelah keluar dari penjara. Menurut Ashour (2009), kondisi di dalam penjara (*prison*) memainkan peran penting dalam membantu individu teradikalisasi lebih jauh untuk melawan negara. Dengan kata lain Ashour ingin mengatakan bahwa kondisi penghukuman di penjara sangat menentukan proses individu menjadi lebih radikal atau malah sebaliknya, terderadikalisasi. Hal tersebut tentu sangat tergantung pada bagaimana kondisi dan pola pembinaan narapidana di dalam penjara.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Radikalisasi di Dalam Penjara**

Menurut *The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence* (ICSR, 2010:17), radikalisasi adalah suatu proses dimana individu atau kelompok menerima dan (utamanya) berpartisipasi dalam penggunaan kekerasan untuk tujuan-tujuan politik. Biasanya merujuk pada *violent radicalization*, untuk menekankan radikalisasi yang dimaksud berkaitan dengan radikalisasi kekerasan yang berbeda dengan proses berfikir “radikal”. Mengutip pandangan Mitchell D. Silber dan Arvin Bhatt (2007), Tito Karnavian (2010)<sup>4</sup> mengatakan bahwa radikalisasi adalah:

*“The progression of adopting, nurturing and developing extreme Islamist belief system that includes the willingness to use, support, or to facilitate violence as a method to affect societal change”*

(terjemahan bebas: suatu kemajuan dalam mengadopsi, memelihara dan mengembangkan sistem keyakinan Islam ekstrim meliputi keinginan untuk menggunakan, mendukung, atau memfasilitasi kekerasan sebagai sebuah metode untuk mempengaruhi perubahan sosial kemasyarakatan).

Radikalisasi tidak timbul begitu saja, melainkan melalui suatu proses yang membutuhkan waktu dan aktor yang terlibat di dalamnya. Dalam artikel opini di *The Jakarta Post* (27/8/2010) yang berjudul *Prison radicalization and how it happens: An analysis into root causes of terrorism*, Noor Huda Ismail (Direktur Yayasan Prasasti Perdamaian) mengatakan bahwa setidaknya ada empat faktor yang memungkinkan terjadinya radikalisasi di dalam penjara atau setelah keluar dari penjara:

---

<sup>4</sup> Tito Karnavian, De-Radikalisasi Dan Kontra Radikalisasi: Strategi Inovatif Kontra Terorisme, Paper disampaikan dalam Simposium Nasional “Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme,” Kerjasama Menkopulhukam, Polri, UIN Jakarta, UI, Lazuardi Birru, dan LSI, Le Meridien Hotel, Jakarta, 27-28 Juli 2010.

- *Religious gathering*, yakni dimana narapidana teroris biasanya diberikan kepercayaan dan tanggung jawab atas fasilitas masjid di penjara. Hal ini sangat beresiko, karena dari sini napi teroris mendapatkan keuntungan berupa kesempatan interaksi mereka menjadi lebih mudah untuk melakukan pendekatan dan kerjasama baik dengan sipir maupun napi lain.
- *Internal discussion*, yakni diskusi internal yang melibatkan ustadz dari dalam atau luar penjara, termasuk hubungan via telepon. Beberapa diskusi tidak dimoderatori dan tidak melibatkan orang lain sehingga memungkinkan terjadinya internalisasi nilai dan persepsi tentang jihad, lebih jauh menguatkan pemahaman orang yang diajak berdiskusi untuk tetap berkomitmen pada jihad.
- *Reading material about jihad*, relatif mudah untuk menemukan bahan bacaan tentang jihad dan mendiskusikannya di dalam penjara. Sesuai dengan pepatah bahwa buku adalah guru terbaik, khususnya dalam proses internalisasi pemahaman jihad. Yang terjadi adalah banyak buku teks Arab yang dibawa dari luar ke dalam penjara oleh narapidana teroris diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, kemudian didistribusi secara luas sebagai sarana untuk mempengaruhi pemikiran orang lain.
- *A strong bond between the jihadist (terrorist)*, kuatnya ikatan antara teroris seringkali dibangun di dalam penjara, membuat mereka lebih eksis baik secara individu maupun kelompok. Interaksi mereka dalam kelompok terus berlanjut dari sebuah landasan ideologis menuju penguatan posisi masing-masing. Dalam komunitasnya, mereka mendapatkan penghargaan status sosial yang tinggi serta dianggap sebagai “pembela agama” dan “pahlawan”. Napi teroris juga selalu di jenguk sebagai bentuk solidaritas sesama muslim.

Sedangkan dalam konteks Amerika, menurut Frank J. Cilluffo, *et al* (2007:114), radikalisis walaupun dilakukan oleh sebagian kecil populasi tapi memiliki konsekuensi yang sangat besar. Dalam sejarah (Amerika), penjara merupakan inkubator ide-ide ekstrim, dan *jihadist* bukanlah yang pertama dalam menginfiltrasi dan merekrut anggota di dalam penjara. Kelompok ekstrim sayap-kanan, termasuk “*Posse Comitatus*”, “*the Order*”, “*Aryan Nation*”, dan berbagai varian gerakan milisi, telah dibentuk atau direkrut di dalam penjara. Hal ini karena narapidana adalah “*captive audience*” dan sering mengalami banyak karakteristik yang mempermudah mereka rentan untuk mengalami radikalisis, seperti alienasi, sikap anti sosial, kekecewaan, isolasi sosial, dan kecenderungan mendapatkan kekerasan.

Lebih lanjut Frank J. Cilluffo, *et al* (2007:115) mengatakan bahwa kerentanan narapidana untuk mengalami radikalisasi tidak berhenti setelah mereka keluar dari penjara. Setelah menjalani hukuman, mereka sering meninggalkan penjara dengan kondisi finansial yang tidak mencukupi, emosional, dan tidak mendapat dukungan keluarga. Ketika dukungan tersebut tidak ada seringkali mereka didekati oleh kelompok atau komunitas religius, yakni kelompok ekstrim yang menyamar dan mengaku sebagai organisasi legal yang membantu narapidana yang baru keluar dari penjara. Salah satu kelompok ekstrim yang diketahui melakukan hal tersebut adalah *al Haramain*, yang memiliki *database* berisi informasi lebih dari 15.000 narapidana yang dianggap rentan, termasuk nama, tanggal keluar, dan alamat narapidana.

### **Kontra-Radikalisasi dan Deradikalisasi**

Kata deradikalisasi menjadi aktual belakangan ini sebagai suatu bentuk pendekatan baru dalam rangka mencegah dan menanggulangi bahaya terorisme. Kata deradikalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris *deradicalisation* yang kata dasarnya adalah *radical*. Kata radikalisasi sering digunakan untuk menggambarkan proses dimana individu mentransformasi pandangan mereka terhadap dunia dari kondisi suatu masyarakat yang cenderung “normal” menuju masyarakat yang cenderung “ekstrim”. Dalam beberapa kasus, individu tersebut kemudian akan melibatkan diri mereka dalam tahap berikutnya yaitu melakukan tindakan-tindakan kekerasan (Greg Hannah, *et al*, 2008: 2-3).

Radikalisasi tidak hanya dimotivasi oleh suatu landasan ideologi tapi juga dipengaruhi oleh faktor lain. Sebagai contoh, di akhir tahun 1960 dan awal 1970, Perang Vietnam muncul sebagai manifestasi ketidakpuasan umum atas kapitalisme dan frustrasi terhadap pembatasan politik konvensional yang kemudian menjadi sebuah katalisator bagi banyak generasi muda untuk berpartisipasi dalam gerakan revolusioner komunisme. Sebagian kecil anak muda bergabung dalam kelompok ekstrim, organisasi sayap kiri yang berorientasi melakukan kegiatan “terorisme”.

Saat ini, pemerintahan Inggris (Eropa) *concern* tentang ancaman dari terorisme utamanya berfokus (walaupun tidak secara eksklusif) pada manifestasi dengan apa yang digambarkan sebagai *radical Islam*, suatu istilah yang didefinisikan *Security Service the Netherland* sebagai gerakan politik-religius (*the politico-religious*) yang mengejar pendirian suatu masyarakat yang merefleksikan penerimaan terhadap nilai-nilai dari sumber-sumber ajaran Islam yang “semurni-murninya” (*Minister of the Interior and Kingdom Relation* 2006:3). Akibatnya, dalam konteks ini radikalisasi adalah internalisasi seperangkat kepercayaan atau keyakinan,

suatu pola pikir (*mindset*) militan yang mempercayai kekerasan atas nama jihad sebagai keyakinan tertinggi (Jenkins, 2007:2).

Adapun definisi konsep deradikalisasi belum banyak yang mendefinisikan, tapi pada dasarnya deradikalisasi adalah suatu usaha untuk mengajak para teroris dan para pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Seperti usaha diplomasi publik yang bertujuan untuk “memenangkan hati dan pikiran” (*International Crisis Group/ICG*, 2007:1). Deradikalisasi menjadi populer dalam siklus kontra terorisme, yang juga dapat berarti suatu proses konseling yang bertujuan pada memodifikasi interpretasi naskah-naskah religius, memberi jarak atau melepaskan ikatan (*disengagement*) seseorang dari kelompok jihad tertentu, atau dukungan untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat (ICG, 2007: 11)

Menurut *The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence* (ICSR, 2010:17), istilah *deradicalisation* dan *disengagement* menggambarkan proses dimana individu atau kelompok untuk melepaskan keterlibatan mereka dalam organisasi kekerasan atau kelompok teroris. Deradikalisasi secara substantif bertujuan untuk merubah tindakan dan ideologi individu atau kelompok. Sedangkan *disengagement* berkonsentrasi pada memfasilitasi perubahan perilaku, melepaskan ikatan (*disengage*) dan menolak penggunaan kekerasan.

Merujuk pada John Horgan (2009:27), bahwa

*“The disengaged terrorist may not be “deradicalized” or repentant at all. Often physical disengagement may not result in any concomitant change or reduction in ideological support”.*

Dengan kata lain, Horgan berpendapat bahwa para teroris yang telah melepaskan ikatan (*disengagement*) dengan kelompoknya tidak selalu menjadi ter-deradikalisasi (*deradicalized*) atau menyesali perbuatannya. Seringkali fisiknya memang *disengage* tapi tidak seraya merubah atau mereduksi ideologi mereka.

Sedangkan pengertian deradikalisasi menurut Golose (2009), adalah segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau ter-ekspose paham radikal dan atau pro-kekerasan. Dalam hal ini mereka termasuk: napi, mantan napi, individu militan radikal yang pernah terlibat, keluarga, simpatisannya, dan masyarakat umum. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan



kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan.

Lebih lanjut Golose (2009) menekankan bahwa program deradikalisasi harus bisa melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris, atau menghentikan penyebaran ideologi itu. Sehingga dalam pelaksanaannya (deradikalisasi) perlu dilakukan bersamaan dengan deideologi. Deideologi ini kunci utama dalam penyadaran serta proses reorientasi ideologi teroris untuk kembali ke ajaran yang benar. Proses deradikalisasi sebenarnya adalah pembalikan dari proses radikalisasi yang dimulai dari perekrutan, pengidentifikasian diri, indoktrinasi, dan jihad yang disesatkan. Jadi, proses deradikalisasi dimulai dari identifikasi dan klasifikasi narapidana dan mantan narapidana, fokus penanganan terpadu, *disengagement* dengan pendekatan humanis, *soul approach* (pendekatan jiwa) dan deideologi, multikulturalisme dan kemandirian (Golose, 2009: 63).

### **PELAKSANAAN DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG**

Berkembangnya pola dan jenis kejahatan seperti terorisme, narkoba, korupsi dan kejahatan lainnya pada dasarnya secara langsung memengaruhi pelaksanaan sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Kondisi tersebut diantisipasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan melakukan langkah strategis, teknis dan sistematis, yakni dengan membuat Prosedur Tetap (Protap)<sup>5</sup> Narapidana Resiko Tinggi. Narapidana yang diidentifikasi sebagai Narapidana Resiko Tinggi dalam Protap tersebut adalah narapidana yang dipidana karena kejahatan terorisme, narkoba, dan korupsi atau berdasarkan penetapan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Identifikasi ini dimaksudkan untuk mempermudah perlakuan pembinaan dan pengamanan yang akan diterapkan, termasuk bagaimana merumuskan tindakan yang perlu dilakukan apabila ada indikasi Narapidana Resiko Tinggi tersebut akan melarikan diri, melakukan pelanggaran dan/atau mengidap penyakit menular. Subtansi yang diatur dalam protap tersebut secara umum berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan. Oleh karena itu, hal-hal yang diatur dalam Protap ini bersifat khusus terkait dengan Narapidana Resiko Tinggi, sedangkan hal-hal yang sudah diatur tetap berlaku (Ditjenpas, 2010:2).

---

<sup>5</sup> Protap diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 Tanggal 23 April tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi.

**Bentuk Pembinaan Narapidana Terorisme di Lapas Kelas I Cipinang**

Dalam hal pembinaan narapidana, Lapas Kelas I Cipinang memiliki bidang khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan narapidana, yakni Bidang Pembinaan. Bidang Pembinaan narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bagi narapidana dengan sistem pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan narapidana dibantu oleh beberapa seksi, yaitu; Seksi Registrasi, Seksi Perawatan, dan Seksi Bimbingan Kemasyarakatan.

Seksi Registrasi bertugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi, dan sidik jari narapidana. Semua berkas mengenai informasi data diri narapidana berada di Seksi Registrasi. Informasi mendalam tentang seorang narapidana, seperti tanggal masuk, jenis kasus, waktu keluar, riwayat hidup selama menjalani hukuman di Lapas dapat kita ketahui di Seksi Registrasi. Seksi Perawatan bertugas untuk mengurus makanan dan kesehatan narapidana. Seksi Perawatan bertanggung jawab atas kondisi dapur, klinik, rawat inap, jumlah narapidana yang sakit, mendata jenis penyakit (seperti TB dan HIV/Aids), menetapkan standar gizi makanan untuk narapidana, dan mendata jumlah narapidana yang dirawat di rumah sakit di luar Lapas. Kemudian Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Bimkemas) bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, melaksanakan latihan olahraga, melaksanakan asimilasi, cuti dan pembebasan bersyarat. Petugas pemasyarakatan yang bertugas di Seksi Bimkemas inilah yang berinteraksi langsung untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana di dalam Lapas. Oleh karena itu, Seksi Bimkemas dapat dikatakan sebagai "ujung tombak" pelaksanaan pembinaan di dalam Lapas Cipinang karena mereka bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan pembinaan narapidana.

*"(Seksi) Bimbingan Kemasyarakatan yang langsung berada di lapangan, memantau proses pembinaan narapidana, bagaimana kondisi mesjid, gereja, vihara, bagaimana pramuka, perpustakaan, olahraga, itu semua dilakukan oleh mereka semua yang juga dibebani tugas secara administrasi. Memberikan pembinaan kepada narapidana untuk memperoleh hak-hak mereka terutama khususnya tentang pembebasan bersyarat, itu juga salah satu bentuk pembinaan, mereka mendapat haknya untuk pulang lebih awal dari waktu yang ditentukan, tentunya melalui proses dan aturan yang ada". (Wawancara dengan Syamsul Hidayat, Kabid Pembinaan LP Cipinang Kelas I, 24 Mei 2010)*

Menurut Syamsul Hidayat (Kepala Bidang Pembinaan Lapas Cipinang Kelas I 2010), seluruh kegiatan narapidana bersifat rutin dan sudah terjadwal setiap harinya. Kegiatan narapidana tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pembinaan terhadap seluruh warga binaan yang berada di dalam Lapas Cipinang. Pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan fisik seperti olahraga, mental spiritual, pendidikan. Selanjutnya ada juga pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Kegiatan Kerja, seperti pertukangan kayu, otomotif, reparasi AC dan perikanan. Seluruh bentuk pembinaan ini dilakukan dalam rangka memberikan kontribusi kepada warga binaan agar setelah keluar dari Lapas memiliki keterampilan dan dapat hidup mandiri.

### **Aktivitas Narapidana Terorisme di Lapas Cipinang Kelas I**

Menurut data yang diberikan oleh Bidang Pembinaan, jumlah warga binaan pemasyarakatan pada tanggal 21 Mei 2010 yang terkait tindak pidana terorisme berjumlah sebanyak 17 orang. Terdiri dari 15 orang narapidana dan 2 orang lainnya berstatus tahanan. Namun pada saat itu hanya 7 orang yang berada di Lapas Cipinang, sisanya sekitar 10 orang bon Mabes Polri untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Sebagaimana dikatakan oleh Syamsul Hidayat:

*“Jumlah napi seluruhnya hingga saat ini ada 17 orang, namun 10 orang napi “bon” mabes Polri, jadi yang kita bina saat ini di lapangan, yang mengikuti kegiatan pembinaan sekitar 7 orang”.*  
(Wawancara dengan Syamsul Hidayat, 24 mei 2010)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang narapidana terorisme yakni Sugiarto<sup>6</sup> diketahui bahwa seluruh narapidana terorisme ditempatkan dalam blok khusus bersama narapidana korupsi tetapi beda lantai. Narapidana terorisme ditempatkan di blok 3 lantai 1 (satu), tepatnya kamar 125, 126, dan 129, sedangkan narapidana korupsi berada di blok 3 lantai 2 dan 3.

*“yang masih aktif untuk teroris sendiri tinggal 7, ada empat kamar di tipe 3, yaitu kamar 125, 126, dan 209, dan saya di 125 tiga orang, bareng ust aslam sama wahyudi, ust aslam itu mas parmin, ya lumayan besar kamarnya”.* (Wawancara dengan Sugiarto, 24 Mei 2010)

---

<sup>6</sup> Sugiarto alias Sugicheng als Raja (pasal 15 jo. Pasal 7 UU No 15 tahun 2003 dan dipidana 12 tahun)

Penempatan narapidana terorisme dalam satu blok merupakan salah satu kebijakan Lapas Cipinang dalam rangka pembinaan khusus narapidana terorisme. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pemantauan terhadap narapidana terorisme. Khusus untuk narapidana tindak pidana terorisme dan korupsi, pihak Lapas berkoordinasi langsung dengan Densus 88 AT dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai contoh seringkali narapidana terorisme diperiksa lebih lanjut oleh Densus 88 AT di luar Lapas dalam rangka memperoleh tambahan informasi terkait jaringan terorisme yang masih aktif.

### **Kegiatan Olahraga**

Olahraga merupakan salah satu bentuk pembinaan fisik yang diberikan oleh Lapas kepada seluruh narapidana, termasuk narapidana terorisme. Beragam jenis cabang olahraga yang diadakan di Lapas Cipinang Kelas I antara lain; Futsal, Volley, Badminton, Tennis Meja. Narapidana dibebaskan untuk memilih dan berpartisipasi ke salah satu cabang tersebut sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing.

Menurut Parmin (narapidana terorisme) cabang futsal lebih diminati oleh narapidana terorisme. Biasanya mereka melakukan aktivitas olahraga futsal pada hari Jum'at, Sabtu, dan Minggu. Pertandingan futsal dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB di Lapangan utama Lapas Cipinang.

*“kalo olahraga kita (narapidana terorisme) hobby di Futsal sepak bola, kita main pagi hari jumat, sabtu, ahad, yang main bebas, biasanya 5 tim, jadi 5 kali 5 sekitar 25 orang”.* (wawancara dengan Parmin, 24 Mei 2010)

Dalam pertandingan futsal tersebut narapidana terorisme berinteraksi dengan narapidana lainnya. Tidak hanya itu narapidana juga dapat berinteraksi secara normal dan penuh kekerabatan bersama petugas pasyarakatan yang juga sering berpartisipasi dalam pertandingan futsal. Sebaliknya, narapidana terorisme kurang antusias dengan cabang olahraga lain dan cenderung tidak mengikuti kegiatan seperti seni musik, *band*, dan kepramukaan. Hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut ada proses seleksi dan memang narapidana terorisme -yang kebetulan seluruhnya beragama Islam- kurang menyukai musik dan kepramukaan. Selebihnya, narapidana terorisme mengikuti kegiatan bimbingan kerja yang disediakan di Lapas seperti reparasi elektronik, listrik, dan pertukangan.

*“ya kalo futsal, kalo Band kita ga suka, kalo pramuka kurang hobby apalagi pake seragam-seragam dan Pramuka tidak banyak kegiatan. Yang banyak kegiatan biasanya binger (bimbingan kerja) ada yang elektronik, listrik, pertukangan”.* (Wawancara dengan Parmin, 24 Mei 2010)

Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa secara sosial narapidana berinteraksi secara normal baik kepada narapidana lain maupun petugas pemsarakatan yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan. Mereka aktif dalam kegiatan olahraga futsal dan mengikuti bimbingan kerja yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mereka setelah nanti keluar dari Lapas.

### **Kegiatan Ta’lim wa Ta’alum**

Dari data yang didapat dari Bidang Pembinaan diketahui bahwa seluruh narapidana terorisme di Lapas Cipinang Kelas I beragama Islam. Dapat dikatakan bahwa mereka merupakan muslim yang mengetahui persoalan agama dan taat dalam beribadah. Pada saat dilakukan wawancara pun kedua narapidana sedang dalam keadaan *shoum* (puasa Senin-Kamis) -sunnah Nabi Muhammad S.A.W-. Dari wawancara mendalam kepada dua orang narapidana terorisme tersebut diketahui bahwa Parmin adalah seorang lulusan pesantren yang tidak pernah mengecap pendidikan formal di sekolah negeri dan berprofesi sebagai guru honorer.

*“kalau saya itu orang pesantren, lulusan Darusysyhadah Boyolali. Ketika ditangkap status saya sebagai guru honorer Bahasa Arab MTs di Tasikmalaya”.* (Wawancara dengan Parmin, 24 Mei 2010)

Berbeda dengan Parmin, Sugiarto adalah seorang yang berpendidikan tinggi. Sugiarto adalah mahasiswa IAIN Raden Fatah Palembang dan bisa dibilang aktivis mahasiswa Islam yang aktif dalam kegiatan keIslaman di kampus sebelum tertangkap oleh Densus 88 karena keterlibatannya dalam rencana pemboman salah satu kafe di daerah Padang.

*“awalnya terjadi dialog-dialog di kampus IAIN Raden Fatah Palembang, waktu itu seingat saya sih semester dua atau semester tiga sudah mulai gabung kemudian mengikuti segala kegiatannya (kelompok pengajian dakwah tauhid wal jihad bersama ustadz veteran Poso dan Ambon)”.* (Wawancara dengan Sugiarto, 24 Mei 2010)

Latar belakang pengalaman dan pendidikan narapidana terorisme membentuk diri mereka menjadi pribadi muslim yang fasih berbahasa arab dan mengetahui persoalan seputar agama Islam. Sebagai contoh salah seorang narapidana terorisme yang bernama Abu Husna adalah seorang *hafizh* (penghafal) Quran 30 Juz. Karakter sebagai seorang pengajar agama (*ustadz*) tidak hilang begitu saja ketika narapidana terorisme dimasukkan ke dalam Lapas. Justru mereka menjadikan Lapas sebagai tempat berdakwah, menghabiskan waktu untuk mengajar narapidana lain mengenai Islam. Bagi narapidana terorisme adalah sebuah prestasi jika ada narapidana lain yang bisa bertobat karena dakwah mereka di dalam Lapas.

*“intinya dengan keadaan kita sekarang yang paling tepat adalah dakwah, yang paling tepat disini adalah dakwah..Kalo tahanan-tahanan narkoba, kriminal udah pada tobat saja itu sudah merupakan prestasi menurut saya dan menurut ikhwan-ikhwan disini”.* (Wawancara dengan Sugiarto, 24 Mei 2010)

Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh narapidana biasa disebut *ta’lim wa ta’alum* yang berarti belajar mengajar. Mereka biasanya mengajar baca tulis Quran, *tajwid* dan Bahasa Arab. Selain itu beberapa narapidana terorisme juga membahas kitab yang berkaitan dengan masalah *fiqh* seperti kitab “*Subulussalam*” -syarah “*Bulughul Marram*” karya Ibnu Hajar al Asqolany-. Sebagian besar santri yang belajar dengan mereka adalah narapidana korupsi karena mereka ditempatkan dalam satu blok (3). Menurut Sugiarto para koruptor biasanya belajar baca *Iqro’* karena mereka tidak bisa membaca Al-Quran.

*“kita ngajar bahasa arab, ngajar tajwid, disini banyak orang Islam tapi ga bisa baca Quran, kita bahas “Subulussalam” syarah dari kitab “Bulughul Marram”, kitab fikih bagaimana menyelenggarakan jenazah, kan bapak-bapak koruptor perlu ilmunya juga kan, ada babul maa’ (bab air) dan sebagainya”.* (Wawancara dengan Sugiarto 24 Mei 2010)

Kegiatan dakwah dan *ta’lim* narapidana terorisme biasanya dilakukan di dalam musholah-musholah yang tersedia di setiap blok/tipe. Narapidana lebih sering sholat di dalam musholah blok mereka dari pada di Masjid. Hal ini karena mereka hanya diperkenankan ke Masjid untuk sholat Zhuhur, Ashar, dan sholat Jum’at atau jika ada kegiatan ceramah umum atau diskusi tematik yang diselenggarakan oleh Lapas. Menurut Sugiarto, dibangunnya Musholah di setiap blok tidak lepas dari permintaan narapidana terorisme

sebelumnya yang kemudian di fasilitasi oleh pihak Lapas. Karena setiap narapidana berhak untuk mendapatkan fasilitas beribadah yang memadai.

*“jadi dalam satu blok ada satu tempat diantara kamar satu dengan kamar lain disekat dijadikan mushola, dulu seingat saya dibangun dimasanya ustadz Adung, ust Adung itu ya itu petingginya JI yang sudah keluar, mendirikan mushola-mushola banyak, karena dulu kita disini ada sekitar 40 orang banyak satu pasukan”. (Wawancara dengan Sugiarto, 24 Mei 2010)*

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Lapas Cipinang bahwa setiap lantai blok ada mushola. Sejarah dibangunnya musholah-musholah di setiap blok adalah permintaan dari narapidana terorisme untuk mempermudah peribadatan sholat mereka setiap harinya. Akhirnya Lapas menyediakan petakan-petakan kamar yang disekat untuk dijadikan sebagai musholah. Musholah itu juga dijadikan tempat sholat bagi petugas yang berjaga di lantai tersebut sekaligus memantau kegiatan narapidana terorisme dan memperhatikan apa yang mereka ajarkan ke narapidana yang lain.

Pada mulanya narapidana terorisme diperbolehkan untuk mengajar di berbagai Musholah di setiap blok/tipe. Sugiarto sendiri memiliki jadwal rutin mengajar Bahasa Arab. Hari Senin dan Rabu, Sugiarto mengajar Bahasa Arab di Musholah *“Darush Shobri”* blok 3 mulai pukul 07.00-09.00 WIB. Hari Selasa, Rabu, dan Sabtu Sugiarto mengisi *ta’lim* umum di Mushola blok 5 lantai 4. Tidak jauh berbeda dengan Sugiarto, Parmin juga memiliki jadwal mengajar bahasa arab pada hari Selasa dan Kamis di blok 3, dimana semua pesertanya adalah koruptor.

Namun, menurut penuturan Sugiarto dan Parmin belakangan ini kegiatan mengajar (*ta’lim*) mereka dibatasi oleh pihak Lapas. Jika sebelumnya mereka diperkenankan mengajar lintas blok, maka saat ini mereka hanya diperbolehkan mengajar di dalam blok-nya sendiri. Dengan kata lain saat ini narapidana terorisme hanya diperbolehkan mengajar narapidana korupsi yang notabene memang satu blok. Pembatasan tersebut terjadi setelah mencuatnya kasus Rois<sup>7</sup> di media massa yang diduga terlibat dalam pelatihan kelompok militan di Aceh dari dalam Lapas.

---

<sup>7</sup> Iwan Dharmanto alias Muhammad Rois. Rois adalah salah satu pelaku pengeboman Kedutaan Besar Australia pada November 2004. Berdasarkan keterangan sejumlah tersangka teroris yang ditangkap di Aceh beberapa waktu lalu, mereka merencanakan membebaskan Rois dari Cipinang. Sambil berlatih kemeliteran di pegunungan, mereka juga berencana membunuh orang-orang asing di Aceh dan perompakan di perbatasan Aceh-Sumatera Utara. Polisi mendeteksi dua tersangka yang ditangkap di Aceh, Sapta alias Ismet alias Syaeldendra (40) dan Zaki Rahmatullah alias Abu Jahid, kerap bertelepon dengan Rois. Sapta dan Zaki berasal dari Pandeglang, Banten.

*“secara resmi Kalapas memanggil semua napi terorisme. Dalam pemanggilan tersebut kami diminta untuk menghentikan memberikan ceramah, karena konsidi yang “panas” berkaitan dengan banyaknya sorotan dari luar. Pemanggilan tersebut bertepatan dengan pemindahan napi teroris Rois dan Hasan ke Nusakambangan, yang juga teman sekamar saya. Kalapas hanya bilang “ustadz tolong dihentikan dakwahnya, jangan berdakwah, jangan menyebar pemikirannya”. (Wawancara dengan Parmin, 24 Mei 2010)*

Semenjak pembatasan tersebut, narapidana terorisme tetap mengajar di blok 3 (tiga). Menurut Sugiarto seringkali narapidana blok lain yang menjadi belajar padanya menanyakan kepada dirinya tentang alasan kenapa dia tidak mengajar lagi. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana terorisme diterima dan dibutuhkan oleh narapidana lain untuk mengajarkan agama.

### **Berdagang**

Sebagian besar narapidana terorisme berasal dari luar daerah Jakarta. Dua orang narapidana yang penulis wawancarai berasal dari Wonogiri (Parmin) dan Palembang (Sugiarto). Oleh karena itu narapidana terorisme jarang dibesuk oleh keluarganya karena alasan jarak dan biaya transportasi. Padahal sebagaimana narapidana lainnya, mereka juga memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, seperti untuk makan, membeli pakaian, dan lain-lain.

*“Aktivitas sebenarnya bebas, mau jualan juga bisa, kalo (yang memakai) pakaian kaya gini (gamis ala Pakistan) banyak (di dalam Lapas) karna mereka beli pakaiannya dari kita, santri-santri kita pake gamis”. (wawancara dengan Parmin, 24 Mei 2010)*

Jika kita berkesempatan untuk sholat Jum'at di dalam Masjid Lapas Cipinang, maka kita dapat menyaksikan banyak narapidana umum yang mengenakan gamis. Menurut Sugiarto, narapidana yang mengenakan gamis sebagian besar adalah santri narapidana terorisme. Narapidana tersebut membeli gamis dari narapidana terorisme. Selain itu narapidana terorisme juga menjual obat-obat herbal seperti madu, *habbatus saudah* (jintan hitam), dan sejenisnya kepada narapidana lain di dalam Lapas. Dari hasil



keuntungan berdagang inilah narapidana terorisme mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

### **Ceramah Umum dan Diskusi**

Dalam rangka melakukan pembinaan kesadaran beragama, Bidang Pembinaan Lapas yang dimotori oleh Seksi Bimbingan Kemasyarakatan juga memberikan pembinaan dalam bentuk ceramah umum agama dan diskusi yang dilakukan di tempat peribadatan agamanya masing-masing. Karena narapidana terorisme seluruhnya beragama Islam, maka dalam hal ini Lapas Cipinang bekerjasama dengan Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan pembinaan kepada narapidana terorisme.

Menurut Syamsul Hidayat, Departemen Agama berkontribusi dalam menyiapkan imam sholat *rawatib* dan penceramah sholat Jum'at sepanjang tahun. Jadi seluruh imam dan *khotib* Jum'at adalah pegawai Depag yang ditugaskan di dalam Lapas. Hal ini dilakukan menurut Syamsul untuk menghindari kekosongan imam dan penceramah, sehingga narapidana terorisme tidak memiliki kesempatan untuk memberikan *taushiyah* atau ceramah agama yang dikhawatirkan menjadi sarana masif penyebaran pemikiran-pemikiran narapidana terorisme.

*“Kita (Bid pembinaan) selama ini menjembatani mereka, kita bekerjasama dengan MUI, Depag, termasuk juga LSM. Misalnya kita adakan diskusi di Masjid utama kita hadirkan ustadz-ustadz dari Depag, juga menjadi khotib jum'at”.* (wawancara dengan Syamsul Hidayat, 24 mei 2010)

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga berperan dalam mengirimkan para *da'i* nya ke Lapas untuk membantu proses pembinaan narapidana menjadi lebih baik. Mengadakan diskusi-diskusi yang bersifat masif di masjid Lapas dan memberikan buku-buku bacaan Islami di Perpustakaan Lapas sebagai bahan bacaan untuk menambah khazanah pengetahuan narapidana tentang Islam.

### **Kendala Pembinaan Narapidana Terorisme di Lapas Cipinang Kelas I**

Merujuk pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, disebutkan bahwasanya agar pembinaan warga binaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan sarana yang memadai baik fisik maupun non fisik. Sarana fisik antara lain berupa gedung atau bangunan berikut

komponen-komponen penunjang berupa peralatan pembinaan atau bimbingan. Sedangkan sarana non fisik berupa disiplin yang dimiliki oleh semua petugas Lapas. Selain itu ada pula sarana berupa bahan-bahan untuk mendukung semua kegiatan pembinaan. Bahan-bahan pendukung itu meliputi buku-buku pelajaran, alat-alat bantu pengajaran, perlengkapan latihan keterampilan, buku-buku pegangan atau petunjuk, dan lain sebagainya yang sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

### **Sarana Fisik Lapas**

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas pembinaan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum serta dapat aktif dan produktif dalam pembangunan. Dalam hal sarana fisik berupa gedung bangunan, dapat dikatakan bahwa Lapas Cipinang memenuhi standar sarana fisik yang memadai untuk dilakukan pembinaan. Namun, perlu diingat bahwa Lapas Cipinang dibangun untuk kapasitas maksimal 1500 orang narapidana. Sehingga ketika jumlah narapidana yang ada di Lapas Cipinang melebihi kapasitas tersebut, maka baik secara langsung maupun tidak akan mempengaruhi proses pembinaan.

*“Yang dimaksud dengan bentuk pembinaan adalah semua bentuk kegiatan yang diberikan kepada seluruh narapidana secara umum. Jika dikatakan kok kita ga mengakomodir semua, ya lihat saja sarana prasarana kita, misal klub futsal, tidak semua narapidana bisa menikmatinya, ada 2500 narapidana, gimana mereka mainnya wong lapangannya kecil, jadi kita hanya menyesuaikan pembinaan dengan sarana”. (Wawancara dengan Syamsul Hidayat, Kabid Pembinaan Lapas Cipinang Kelas I, 24 Mei 2010)*

### **Kondisi Narapidana Terorisme**

Berdasarkan data yang diberikan oleh Bidang Pembinaan tanggal 21 Mei 2010, tercatat jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang mencapai 3166 orang. Artinya telah terjadi kelebihan kapasitas jumlah penghuni Lapas sebanyak 1666 dari daya tampung awal Lapas sekitar 1500 orang. Jumlah penghuni tersebut merupakan gabungan dari jumlah tahanan dan narapidana.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 orang adalah warga binaan tindak pidana terorisme yang terdiri dari 15 orang narapidana dan 2 orang lainnya berstatus tahanan. Namun, pada saat itu hanya 7 orang yang berada di Lapas Cipinang, sisanya sekitar 10 orang bon Mabes Polri untuk keperluan

penyidikan lebih lanjut. Seluruh narapidana terorisme tersebut ditempatkan dalam blok khusus bersama narapidana korupsi tetapi beda lantai. Narapidana terorisme ditempatkan di blok 3 lantai 1 (satu), tepatnya kamar 125, 126, dan 129, sedangkan narapidana korupsi berada di blok 3 lantai 2 dan 3.

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme, petugas pemasyarakatan biasanya menemui kesulitan disebabkan karena pada faktanya narapidana terorisme tidak menganggap diri mereka sebagai kriminal. Lebih jauh mereka juga menjadikan waktu menjalani hukuman di penjara sebagai kesempatan untuk melanjutkan “perjuangan” dan berdakwah kepada narapidana lain.

*“intinya dengan keadaan kita sekarang yang paling tepat adalah dakwah, yang paling tepat disini adalah dakwah”.* (Wawancara dengan Sugiarto, 24 Mei 2010)

Salah satu pembinaan yang diberikan kepada narapidana terorisme adalah pembinaan kesadaran beragama yang biasanya dilakukan dengan mengadakan ceramah umum dan diskusi di Masjid Lapas. Dalam hal ini Lapas bekerjasama dengan Departmen Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Syamsul Hidayat, Kabid Pembinaan Lapas Cipinang Kelas I:

*“Kita (Bid pembinaan) selama ini menjembatani mereka, kita bekerjasama dengan MUI, Depag, termasuk juga LSM. Misalnya kita adakan diskusi di Masjid utama kita hadirkan ustadz-ustadz dari Depag, juga menjadi khotib jum’at”.* (Wawancara dengan Syamsul Hidayat, 24 mei 2010)

Proses pembinaan kesadaran beragama dalam rangka menyadarkan kesalahan narapidana dengan mengundang para *da’i* dari Depag dan MUI sebenarnya merupakan suatu hal yang positif. Namun persolannya, sebagaimana dikatakan oleh Ansyad Mbai<sup>8</sup> bahwa:

*“Teroris itu memiliki pemahaman agama yang dalam, makanya kalau yang melakukan diskusi dalam rangka deradikalisasi harus bukan “Kiyai tanggung”, karena mereka menganggap Kiyai, Ustadz kita sebagai “Kiyai kelas 2” yang gagal menerapkan syariat islam*

---

<sup>8</sup> Disampaikan pada saat FGD di Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Pembinaan Khusus Narapidana Teroris dalam rangka Penanggulangan Terorisme di Indonesia”, diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2010.

*di Indonesia*”. (Ansyad Mbai, Badan Nasional Penanggulangan Teror 2010)

Oleh karenanya dibutuhkan keseriusan yang lebih dalam menghadapi narapidana terorisme, karena kebanyakan dari mereka adalah lulusan dari pesantren bahkan berkesempatan menempuh pendidikan di Timur Tengah (termasuk Pakistan dan Afghanistan) yang sering berinteraksi langsung dengan Ulama’ –yang pemikiran dan fatwanya- menjadi rujukan umat Islam saat ini. Sehingga seringkali mereka merasa mendapatkan legitimasi untuk melakukan dan mendakwahkan pemikiran-pemikirannya.

### **Kondisi Petugas Pemasyarakatan**

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, pegawai atau petugas pemasyarakatan merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan peranannya. Hal ini dikarenakan kapasitas atau kemampuan petugas pemasyarakatan berbanding lurus dengan kinerja pembinaan yang berujung pada tercapai atau tidaknya tujuan pemasyarakatan. Keseluruhan jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang adalah 394 orang yang terdiri dari pria berjumlah 344 orang dan wanita berjumlah 50 orang (Subbag Kepegawaian Lapas Kelas I Cipinang, 21 Mei 2010).

Dari data yang diberikan oleh Sub Bagian Kepegawaian Lapas Cipinang tersebut juga diketahui bahwa ternyata tingkat pendidikan petugas pemasyarakatan masih belum memadai dalam melakukan pembinaan bagi narapidana. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah, bahwa sejumlah 263 orang (66,75%) pegawai Lapas Cipinang memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 66 orang (16,75%) memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S-1), 22 orang (5,58%) memiliki latar belakang pendidikan Diploma dan pendidikan pada tingkat Pascasarjana adalah sebanyak 7 orang (1,77%). Walaupun jumlahnya relatif kecil, ternyata masih terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 10 orang (2,53%) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 16 orang (4,06%).

Terkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme, maka kita harus menyoroti Bidang Pembinaan. Diketahui bahwa petugas pembinaan – yang merupakan “ujung tombak” pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme- di Lapas Cipinang jumlahnya lebih sedikit dari pada petugas pengamanan Lapas. Petugas pada Bidang Pembinaan berjumlah 78 orang (19,79%) dan pada bagian Pengamanan jumlahnya jauh lebih besar yaitu 228 orang (57,86%) dan apabila dibandingkan antara jumlah petugas pada bidang pembinaan dengan jumlah narapidana keseluruhan terdapat

perbandingan yang sangat tidak seimbang yaitu kurang lebih 1:45 dari jumlah narapidana keseluruhan (3166 orang).

Kondisi tersebut diperparah pada fakta bahwasanya dari 78 orang petugas pembinaan hanya sekitar 21 orang yang terjun langsung melakukan pembinaan. Tugas mereka pun tidak hanya mengurus pembinaan narapidana terorisme, tapi juga narapidana lain yang jumlahnya sangat banyak sekaligus bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana pembinaan (tempat ibadah, kegiatan olahraga, dan sebagainya).

*“Dari bidang saya sendiri pembinaan itu ada tiga seksi, seksi Bimbingan Kemasyarakatan (bimkemas), Registrasi dan Perawatan, nah dari keseluruhan ketiga seksi ini ada sekitar 70 orang. Yang bertugas langsung melakukan pembinaan itu sekitar 21 orang, itu yang ada dibawah Bimbingan Kemasyarakatan, yang ada dibawah yang langsung berada di lapangan yang memantau bagaimana mesjid, gereja, bagaimana vihara, bagaimana pramuka, bagaimana perpustakaan, bagaimana olahraga, itu semua dilakukan oleh mereka semua yang juga dibebani tugas secara administrasi”.* (Wawancara dengan Syamsul Hidayat, Kabid Pembinaan Lapas Cipinang, 24 Mei 2010)

Gambaran sumber daya manusia petugas pemasyarakatan di atas dapat dikatakan sangat memprihatinkan dan butuh penambahan (*upgrading*) baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Oleh karenanya adalah sebagai suatu kewajiban apabila pembinaan narapidana terorisme tidak dapat dilakukan secara baik dan sesuai dengan prosedur pembinaan sebagaimana mestinya.

### **Dukungan Pemerintah dan Masyarakat**

Pada dasarnya pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warganya, termasuk dari ancaman kejahatan terorisme. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi bahaya terorisme adalah membuat kebijakan –melalui Departemen Kementerian Hukum dan HAM- terkait penanggulangan terorisme yang tepat.

Salah satu indikator keseriusan pemerintah dalam menanggulangi bahaya terorisme -khususnya mengenai pembinaan narapidana terorisme di Lapas- adalah seberapa besar anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk Lapas di seluruh Indonesia. Namun, hingga saat ini pada faktanya pemerintah belum menjadikan persoalan Lapas ini sebagai prioritas. Hal ini memang wajar karena permasalahan di Indonesia sangat rumit dan

kompleks. Disamping itu Indonesia bukanlah Negara kaya yang mampu memberikan alokasi anggaran yang besar pada setiap sektor-sektor penting.

Dalam Nota Keuangan 2010, pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran ke lima sektor kementerian. Kelima kementerian itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56,5 triliun. Kedua, Kementerian Pendidikan Nasional, sebesar Rp.50,3 triliun. Ketiga, Kementerian Pertahanan, sebesar Rp.45,2 triliun. Keempat, Kementerian Agama, sebesar Rp.31,0 triliun. Kelima, Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebesar Rp.28,3 triliun. (Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010)

Selain itu menurut Syamsul Hidayat (Kabid Pembinaan Lapas Cipinang), sebenarnya masyarakat merupakan pilar penting dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Karena pada dasarnya pembinaan yang sebenarnya adalah di dalam masyarakat. Oleh karenanya dukungan dari masyarakat -minimal untuk tidak menstigma mantan narapidana- menjadi penting dalam rangka reintegrasi sosial.

*“Maukah masyarakat menerima mereka wong ketika masih di dalam saja sudah di stigma. Banyak masyarakat yang mengkritik penlaksanaan pendidikan paket A dan B “wah enak banget ya di penjara ada sekolah, dikasih makan”, nah inikan artinya masyarakat tidak memahami bahwa di dalam penjara hanya ada hukuman hilang kemerdekaan, sementara hak-hak narapidana yg lain dilindungi undang-undang”. (Wawancara dengan Syamsul Hidayat, 24 Mei 2010)*

Bagaimanapun Lapas seharusnya mampu memberikan pelayanan pembinaan yang baik bagi narapidana, khususnya narapidana terorisme di dalam Lapas. Dalam hal ini sudah seyogyanya Lapas aktif dalam melakukan berbagai kerjasama ke seluruh pihak terkait dalam menyukseskan pembinaan narapidana terorisme dalam rangka deradikalisasi. Seperti melakukan kerjasama dengan MUI, Depag, dan elemen masyarakat yang *concern* dengan persoalan terorisme seperti Yayasan Prasasti Perdamaian, Lazuardi Birru, dan sebagainya.

## Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Kelas I merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme. Dalam hal ini, Lapas Cipinang memberikan berbagai bentuk kegiatan dalam rangka pembinaan mulai dari pembinaan yang bersifat fisik (olahraga, kesenian), mental spiritual (ceramah agama,

kesehatan, diskusi) hingga pembinaan intelektual (pendidikan kejar paket A,B,C).

Penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan kegiatan deradikalisasi narapidana terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Kelas I belum berjalan optimal. Hal ini berdasar fakta di lapangan bahwa secara umum bentuk pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme tidak jauh berbeda dengan narapidana lainnya. Namun, terdapat beberapa hal yang membedakan perlakuan pembinaan terhadap narapidana terorisme, yakni penempatan blok khusus dan pembatasan ruang gerak narapidana terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan narapidana terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan meliputi kegiatan olahraga (futsal), ceramah dan diskusi yang diselenggarakan pihak Lapas – bekerjasama dengan lembaga lain seperti Majelis Ulama' Indonesia, Departemen Agama, LSM-. Selain itu, mereka juga aktif melakukan *ta'lim wa ta'alum* (belajar mengajar alquran, *fiqh*, *tahsin tilawah*, ceramah agama) kepada narapidana lain secara sukarela. Dapat dikatakan bahwa kegiatan *ta'lim* merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh narapidana terorisme di dalam Lapas cipinang Kelas I.

Kegiatan *ta'lim* tersebut biasanya dilakukan di musholah-mushola blok hunian narapidana. Kegiatan *ta'lim* yang dilakukan oleh narapidana terorisme pada dasarnya merupakan kegiatan positif bagi pengembangan pemahaman agama narapidana dan juga bermanfaat dalam membangun hubungan antara narapidana terorisme dengan narapidana lain. Akan tetapi, di sisi lain kegiatan ini berpotensi menjadi sarana narapidana terorisme untuk menyebarkan pemahaman radikalnya.

Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap narapidana terorisme dalam rangka deradikalisasi, Lembaga Pemasyarakatan Cipinang juga menghadapi kendala atau hambatan yang berdampak pada timbulnya ketidakefektifan dalam pembinaan. Setidaknya ada dua faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain kualitas dan kuantitas sumber daya manusia lapas masih membutuhkan *upgrading skill*, sarana prasarana pembinaan, dan anggaran. Sedangkan faktor eksternal antara lain seperti dukungan pemerintah dan masyarakat serta karakter narapidana itu sendiri.

Adapun perlakuan khusus yang dilakukan oleh pihak Lapas terhadap narapidana terorisme adalah menempatkan mereka dalam satu blok dan membatasi kegiatan *ta'lim* mereka dimana pasca mencuatnya kasus Rois narapidana tidak diperbolehkan mengajar narapidana lintas blok.

Menurut penulis, penempatan narapidana dalam satu blok khusus merupakan suatu kebijakan yang tepat guna mempermudah proses

pembinaan dan pemantauan kegiatan narapidana terorisme. Hal tersebut juga memberikan batasan bagi narapidana terorisme untuk mempengaruhi pemikiran narapidana lain. Bagaimanapun pembinaan khusus terhadap narapidana terorisme harus tetap dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Dalam hal ini, keterlibatan seluruh pihak terkait menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan iklim kondusif bagi pembinaan narapidana terorisme dalam rangka deradikalisasi.

### **Rekomendasi dan Saran**

Penulis menyadari bahwasanya penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, persoalan pembinaan narapidana terorisme tidak dapat dibiarkan begitu saja. Lembaga Pemasyarakatan sebagai “ujung tombak” pembinaan narapidana terorisme, bagaimanapun, harus mampu melaksanakan kegiatan deradikalisasi narapidana terorisme sesuai dengan tata aturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini, tentunya Lapas harus melibatkan banyak pihak dalam rangka menyukseskan pelaksanaan deradikalisasi narapidana terorisme. Oleh karena itu penulis memberikan beberapa rekomendasi dan saran sebagai berikut:

### **Saran Permasalahan**

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia beserta kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan data dan fakta yang penulis temukan di lapangan, maka penulis memberi saran bahwa diperlukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus yang membina narapidana terorisme di Indonesia. Hal ini dikarenakan Prosedur Tetap tentang Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi pada kenyataannya sulit untuk diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan umum yang ada saat ini. Bagaimanapun, dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Terorisme – sebagaimana halnya narkotika- bukanlah tanpa resiko dan hambatan seperti kekhawatiran Lapas Khusus tersebut menjadi *school of terrorism*, kendala SDM dan infrastruktur. Namun, diharapkan adanya Lembaga Pemasyarakatan Khusus terorisme dapat membuat fokus pembinaan terhadap narapidana terorisme menjadi lebih baik.

### **Saran Teoritik**

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori mengenai radikalisasi dan deradikalisasi, khususnya yang berkaitan dengan penjara (Lapas). Penulis menyarankan untuk penelitian lanjutan dilakukan penelitian yang lebih spesifik menitikberatkan pada persoalan kebijakan kriminal (*criminal policy*), hal ini dikarenakan bahwa sukses atau tidaknya



pelaksanaan deradikalisasi terorisme, khususnya di Indonesia, adalah dipengaruhi oleh model dan keberpihakan kebijakan kriminal yang diterapkan.

### **Saran Metodologi**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam ke berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan. Penulis menyarankan untuk penelitian lanjutan dilakukan penelitian gabungan (kualitatif-kuantitatif). Dalam hal ini, narapidana lain (umum) dijadikan objek penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengaruh narapidana terorisme terhadap narapidana lain yang berinteraksi dengan mereka di dalam Lapas.

### **Saran Strategis**

- Lembaga Pemasyarakatan harus meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan khususnya yang membina narapidana terorisme. seperti mengadakan training-training, kursus-kursus, atau jika memungkinkan merekrut petugas dari luar AKIP yang memnag kompeten di bidang penanganan terorisme seperti Psikologi, Hukum, Kriminologi, Antropologi, dan sebagainya.
- Lembaga pemasyarakatan harus lebih aktif dalam melakukan kerjasama atau *MoU* dengan berbagai pihak dan instansi dalam rangka meningkatkan mutu pembinaan narapidana terorisme. Seperti Majelis Ulama, Departemen Agama, LSM-LSM, dan akademisi Universitas di seluruh Indonesia. Bahkan melakukan studi banding dengan negara lain yang juga melakukan program deradikalisasi.
- Untuk menyokong terlaksananya pembinaan narapidana terorisme dibutuhkan suatu pengawasan berkelanjutan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan pihak terkait kepada Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka perbaikan sistem dan pendekatan pembinaan.
- Program deradikalisasi yang menitik beratkan pada usaha perubahan mental dan ideologi narapidana teroris yang melibatkan berbagai pihak harus lebih diutamakan dari pada program lain yang bersifat fisik.
- Alokasi anggaran harus ditingkatkan sebagai wujud dukungan nyata pemerintah terhadap program deradikalisasi terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Golose, Petrus Reinhard. (2009). **Deradikalisasi Terorisme; Humanis, Soul Approach dan menyentuh Akar Rumput**. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK). Jakarta.
- Ismail, Noor Huda. (2010). **Temanku, Teroris?** Serambi. Jakarta
- Whittaker, David J. (2003). **The Terrorism Reader**, Second Edition including al-Qaeda and 9/11, Routledge. USA and Canada.
- Cilluffo, Frank J. Cardash, Sharon L. and Whitehead, Andrew J. (2007). **Radicalization: Behind Bars and Beyond Borders; The Brown Journal Of World Affairs**, Spring/Summer 2007 volume xiii, issue 2, Homeland Security Policy Institute The George Washington University. [online] <http://www.jstor.org/stable/30046987>
- Ashour, Omar, “*De-Radicalization in Egypt, Algeria, and Libya*”, [online] <http://www.carnegieendowment.org/events/?fa=eventDetail&id=1325> >
- HM Government, 2006, “*Countering international terrorism: the United Kingdom’s strategy*”, Cm 6888, London: HMSO. [online] <http://www.officialdocuments.gov.uk/document/cm68/6888/6888.pdf>
- ICG, 2007 “*Deradicalisation And Indonesian Prisons* ”, Asia Report N°142 – 19 November 2007, [online] <http://www.crisisgroup.org/home/index.>>
- Jenkins, B. M. 2007, “*Building an army of believers: jihadist radicalization and recruitment. Testimony to the House Homeland Security Committee*”, RAND Corporation, [online] <http://stinet.dtic.mil/cgibin/GetTRDoc?AD=ADA465567&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf>
- Ministry of the Interior and Kingdom Relations, 2004, “*From dawa to jihad: the various threats from radical Islam to the democratic legal order*”, Report by the Algemene Inlichting- en Veiligheidsdienst (AIVD) (Netherlands General Security Service), [online] <http://www.investigativeproject.org/documents/testimony/49.pdf>
- Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang Prosedur tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi
- Wawancara mendalam dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Indonesia (Untung Sugiono).
- Wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Kelas I (Syamsul Hidayat).
- Wawancara mendalam dengan Narapidana terorisme Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Kelas I (Sugiarto dan Parmin).